

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial(S.sos)  
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**Okta Candra**

**1441020057**

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**

**PEMBIMBING I : Dr. H. M. Saifuddin M.Pd**

**PEMBIMBING II : Bambang Budiwiranto, S.Ag. MA (AS) P.hD**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**ABSTRAK**  
**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN**  
**PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh: **Okta candra**

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia, permasalahan ini muncul tiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurang modal, tempat berjualan yang tidak menentu, berangkat dari fenomena tersebut pemerintah daerah kecamatan Pesisir Tengah melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melakukan Upaya-upaya dalam Membina Pedagang Kaki Lima berdasarkan UU Perbup No 40 Tahun 2016 yang berlaku di Kecamatan Pesisir tengah Pesisir Barat.

Penulis mengadakan penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Pesisir Barat dengan Rumusan masalah: Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir tengah Pesisir Barat ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Upaya pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Pesisir Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengambilan sample dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 5 Orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapat temuan sebagai berikut: dalam upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan pelaksanaan Perbup No 40 tahun 2016 di kecamatan Pesisir Tengah pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya adalah dibangunnya kios di pasar way batu pemberian bantuan gerobak dan tenda serta di buat lokasi sentra kuliner untuk pedagang kaki lima untuk berjualan pada malam hari.

Dalam proses pembinaan Diskoperindag melakukan komunikasi secara persuasif dan represif kepada para pedagang tidak menaati peraturan, telah dibangun pasar way batu untuk menampung para pedagang kaki lima agar tidak berjualan di ruang publik, bantuan gerobak sebanyak 30 gerobak dan 30 tenda namun tenda yang sebagian besar telah rusak, sentra kuliner juga telah dibuat agar pedagang di beri ruang yang legal untuk berjualan. Belum berjalan nya semua program yang di rencanakan pemerintah seperti bina permodalan dan juga bina

organisasi dimana kedua program ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka.

**Kata Kunci : Pembinaan, Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTA CANDRA

NPM : 1441020057

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak mengisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2020

Yang Membuat Pernyataan

OKTA CANDRA

NPM.1441020057



**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN PESISIR PESISIR TENGAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Nama : Okta Candra**

**NPM : 1441020057**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**

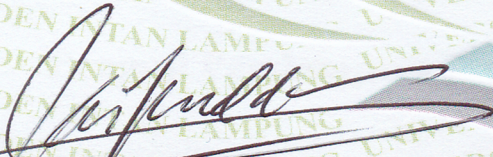
**Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

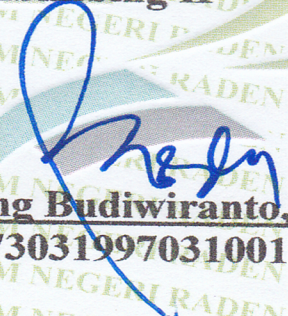
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
UIN Raden Intan Lampung

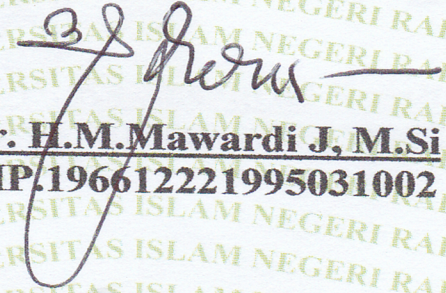
**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd**  
**NIP.196202251990011002**

  
**Bambang Budiwiranto, S.Ag. MA(AS)P.hd**  
**NIP.1973031997031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan PMI**

  
**Dr. H. M. Mawardi J, M.Si**  
**NIP.196612221995031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT.** Disusun oleh **Okta Candra, NPM: 1441020057, Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam.** Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Pada hari/tanggal: **Senin, 6 Januari 2021.**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua** : **Dr. H.M.Mawardi J, M.Si** (.....)

**Sekretaris** : **Fiqih Satria, M.T.I** (.....)

**Penguji Utama** : **Dr. Faizal, M.Ag** (.....)

**Penguji Pendamping I** : **Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd** (.....)

**Penguji Pendamping II** : **Bambang Budiwiranto, P.hD** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**



**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.**

**NIP. 196104091990031002**



# MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

**( QS. Al Insyirah:6-8 )**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Dengan nikmat sehat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta terutama teruntuk Almarhumah Ibundaku, Meli Yunara, yang mana semasa masih hidup beliau lah yang senantiasa mendukung dengan sepenuh jiwa raga dan kasih sayang yang tiada tara, mendo'akan, menyemangati, menasehati dan selalu mengingatkan. Dan untuk ayahanda ku tercinta Zainal Hakim , terimakasih atas segala pengorbanan siang malam mu dalam membiayai ku dan mendoakan ku serta kasih sayang mu. Atas kasih sayang, kerja keras, do'a, semangat dan motivasi-motivasi yang selalu kalian berikan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga ku tercinta, untuk Almarhun Kakek Zairi dan juga Nenek Masamah serta kakak ku Desrianto SH dan adek ku Reza Yanuar. Terimakasih untuk dukungan dan doanya, kalian selalu memberikan motivasi dalam diri untuk selalu sabar dalam menghadapi segala ujian. Kalian merupakan pengganti almarhum ibunda dalam mencurahkan keluh kesah. Terimakasih untuk segalanya.
3. Sahabatku, M Indillah S.pd, Muhtadin S.Ag, Takwanuddin M.pd, .Terimakasih untuk motivasi dan dukungan kalian semua dan terimakasih juga telah mau menemaniku dalam menimba ilmu.

4. Teman-teman PMI A, Ahmad Rivai, Ahmad Khotib Saipi dahlan, M Syaidi Fatoni, Nasrudin Ali, Tesi Andika, Ar Ridho Square serta semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan selama berjuang bersama-sama hingga akhir.
5. Teman-teman seperjuangan terkhusus jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2014, PMI A, PMI B, dan PMI C.
6. Teman-teman KKN kelompok 131 Desa Kedaung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Okta candra dilahirkan di Desa Fajar Bulan tepatnya di Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 15 oktober 1994. Anak ke dua dari 3 bersaudara, lahir dari latar belakang anak seorang petani pasangan Almarhumah Ibu Meli Yunara dan Bapak Zainal Hakim

Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Negeri Pahlungan dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kruai Kecamatan Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 juga penulis langsung melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan manusia untuk selalu menggali ilmu Agama dan pengetahuan. Dengan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang “Upaya Pemerintah Daerah Dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat berjasa. Untuk itu terimakasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Khomsarial Romli, M.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.M.Mawardi J.M.Si selaku Ketua Jurusan serta Bapak Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I selaku Sekretaris Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.M.Saifuddin M.pd selaku pembimbing I, dan Bapak Bambang Budiwiranto, S.Ag. MA(AS)P.hD selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis.
6. Pihak perpustakaan Pusat dan juga Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi pada penulis.

7. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat Bapak Ambar Setiawan ST, telah Mengizinkan Penulis meneliti di Instansi Bapak, serta Bapak Burhanuddin selaku seksi Perdagangan Dalam Negeri telah membantu penulis memberikan informasi demi terselsainya skripsi ini.

Akhirnya ungkapan Do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun materil berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, Februari 2020

Penulis

**Okta Candra**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	21
B. Implementasi Kebijakan .....	23
1. faktor yang mempengaruhi kebijakan.....	23
C. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	27
1. Pengertian Pembinaan .....	27
2. Pembinaan sebagai program dan Proses .....	31
3. Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	33
D. Pedagang Kaki Lima .....	37
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	37
2. Sejarah Pedagang Kaki Lima .....	37
3. Kegiatan Pedagang Kaki Lima.....	40
4. Letak Lokasi Pedagang Kaki Lima .....	42
5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	43
<b>BAB III PEMERINTAH KECAMATAN PESISIR TENGAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Pemerintahan Kecamatan Pesisir Tengah .....	47
1. Monografi Kecamatan Pesisir Tengah .....	47
2. Kondisi wilayah .....	46
3. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah .....	51
B. Gambaran Umum DISKOPERINDAG Kab Pesisir Barat.....	55
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	55
2. Fungsi Diskoperindag .....	56
3. Visi dan Misi Diskoperindag .....	56

4. Struktur Organisasi Diskoperindag.....	58
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian Diskoperindag .....	58
C.Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat .....	66
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH</b>	
A. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah dan Permasalahannya .....	94
B. Analisa Upaya Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	103
C. Penutup .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul Skripsi ini berjudul “ **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT**”, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini terlebih dahulu penulis jelaskan kalimat-kalimat yang dianggap perlu .

Upaya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas , kemampuan dan taraf hidup<sup>1</sup> Atau suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai sesuatu<sup>2</sup> sedangkan menurut Poerwadarmita dalam jurnal Muhammad Fitrah, upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan<sup>3</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Teori dan praktik ekonomi Islam* (Jakarta : Rineka Cipta. 1995) h 67

<sup>2</sup> Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers,1991), h. 61

<sup>3</sup> Muhammad Fitarah, *Study Tentang Upaya Upt. Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Jurnal. h. 80

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah<sup>4</sup>

Salah satu fungsi Pemerintahan Daerah adalah Menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah<sup>5</sup>

Dari definisi diatas pemerintah daerah yang penulis maksud adalah pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan fungsinya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu mengeluarkan suatu kebijakan kaitannya dengan penelitian penulis yaitu Perbup No 40 Tahun 2016<sup>6</sup> tentang pembinaan pedagang kaki lima dalam peraturan tersebut pelaksana pembinaan Pedagang kaki lima tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat.

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih baik.<sup>7</sup> Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafii, Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129

<sup>6</sup> Lampiran Perbup No 40 taun 2016

<sup>7</sup> Ensiklopedia Indonesia vol ichtiar baru van Hoeve, Jakarta , h 89

membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>8</sup>

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang

Pedagang yang penulis maksud adalah pedagang yang berjualan di seputaran pasar<sup>9</sup> di sekitaran kecamatan Pesisir tengah Krui Pesisir barat.

Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang yang berdagang yang menggelar barang dagangannya dengan cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku yang biasa berkaki empat, di tambah dengan sepasang kaki pedagangnyanya sehingga berjumlah lima yang kemudian memunculkan istilah Pedagang Kaki Lima..

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual

---

<sup>8</sup> <http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/pengertian-pembinaan.html> diakses tgl 28 juli 2019 pukul 21:00

<sup>9</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan , *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Balai pustaka, Jakarta 1990) h. 180

barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pedagang Kaki Lima dalam bahasan ini adalah orang-orang yang berdagang dengan cara menggelar barang dagangan nya di tempat darurat dan sederhana seperti cukup dengan menggunakan bangku berkaki empat dan tenda terpal yang bisa di bongkar pasang .

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud judul diatas secara keseluruhan adalah suatu penelitian yang membahas usaha pemerintah daerah dikecamatan pesisir tengah yang dalam hal ini di lakukan oleh DISKOPERINDAG ( Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ) Kabupaten Pesisir Barat dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

## **B. Alasan Memilih Judul .**

Adapun alasan yang melatar belakangi penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut::

1. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia, permasalahan ini muncul tiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya . keberadaan PKL kerap dianggap Ilegal karena menempati ruang public dan tidak sesuai dengan visi kota

sebagian besar menekankan aspek kebersihan , keindahan dan kerapihan kota . Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena menghadap dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya masyarakat miskin mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memperhatikan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurang modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti, adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi yang seperti ini , maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau di tujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas sesuai UU yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik membahas upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam ini dilakukan Oleh DISKOPERINDAG dalam menata dan membina Pedagang kaki Lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Bahwa lokasi penelitian dapat dijangkau dan di dukung oleh bahan literature yang cukup tersedia, sehingga penulis optimis penelitian ini dapat terlaksana tepat waktu dan skripsi ini dapat diselesaikan.

### **C. Latar Belakang Masalah.**

Pedagang Kaki Lima timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, bisa juga minimnya modal usaha yg tersedia. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya keberadaannya kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, kerapian kota atau sering kita dengan istilah 3K. oleh karena itu PKL seringkali menjai target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota seperti penggusuran dan relokasi.

Saat mereka berjualan, mereka mempunyai lebih banyak resiko daripada pedagang pasar. Resiko yang mereka hadapi diantaranya tidak laku, persaingan tidak sehat dari sesama PKL, musim hujan, isu-isu menyesatkan, penggusuran, dll. Resiko diatas menyebabkan mereka rentan. Kerentanan mereka antara lain menyangkut pada modal terbatas, kegiatan usaha subsisten, tidak adanya ijin usaha, dan ketiadaan jaminan tempat usaha, Memang tidak sedikit dari mereka yang menyadari bahwa berjualan pinggir jalan adalah illegal.

Yang kemudian mungkin agak berbeda adalah mereka yang bekerja memanfaatkan eksternalitas pasar, seperti kuli angkut, pedagang asongan, dan pekerja transport. Mereka pun rentan –bahkan sangat rentan- terhadap tidak adanya pekerjaan, pemalakan, dll. Resiko umum sebagai pedagang, seperti rusaknya barang dagangan, kurang laku, dan lain-lain, tidak bisa dikategorikan



sebagai permasalahan. Akar permasalahan kemiskinan di sector perdagangan, khususnya pedagang kecil di pasar dan PKL, berbeda. Bila tadi disebutkan bahwa permasalahan umumnya adalah banyaknya pungutan liar yang harus mereka bayarkan.

Bila kita kaji lebih jauh, permasalahan pungutan liar tersebut tidak serta merta muncul begitu saja. Dalam kasus PKL (termasuk pedagang asongan dan pedagang keliling), akar permasalahan pertama yaitu bahwa menjadi PKL bukan pilihan tanpa keterpaksaan. Bila dilihat mereka menjadi PKL sebagai pilihan terakhir, karena mereka gagal masuk di dunia kerja formal karena keterbatasan pendidikan, lapangan kerja, dll. Setelah gagal masuk ke dunia kerja formal, akhirnya mereka memilih berdagang yang tidak membutuhkan pendidikan..

Tapi kemudian permasalahan kedua menghadang mereka dalam hal modal. Untuk berdagang mereka membutuhkan modal yang besar untuk bisa mendapat tempat formal: dikios atau di pasar. Sampai saat ini tidak ada akses permodalan bagi mereka. Hanya rentenir atau keluarga yang bias memberi pinjaman modal.

Permasalah ketiga yaitu kurangnya infrastruktur untuk berdagang, dalam hal ini pasar atau lapangan khusus untuk berjualan. Akhirnya mereka berjualan di tempat umum yang bukan tempat berjualan. Dan keadaan ini yang dimanfaatkan oleh "oknum" aparat dan preman yang memperjualbelikan trotoar untuk mereka berjualan.

Permasalahan keempat adalah adanya anggapan negative dari pemerintah bahwa PKL adalah sesuatu yang harus diberantas karena mengganggu. Padahal yang harus disadari yaitu bahwa mereka itu berprofesi PKL karena tidak ada tempat yang bisa mewadahi mereka untuk berjualan. Profesi sebagai PKL telah terbukti sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam lembah kemiskinan.

Sementara bagi pedagang, tidak cukup relevan mengkategorikan mereka sebagai orang miskin. Namun bila kita melihat resiko "tidak normal" yang mereka hadapi sebagai pedagang, mereka layak dikategorikan sebagai orang yang rentan. Akar permasalahan yang mereka hadapi tidak banyak, hanya tidak adanya jaminan atas resiko tidak normal tersebut, seperti kebakaran, pemerasan preman.

Hal yang sama di hadapi oleh para Pedagang Kaki Lima dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Khususnya di Kecamatan Pesisir tengah yaitu Pedagang Kaki Lima rata-rata berpendidikan rendah sehingga mereka hanya punya sedikit pilihan untuk mencari nafkah, pilihan mereka tidak lain merupakan pedagang kaki lima , mereka biasa berdagang di pasar pagi di dekat tugu merdeka pasar Krui dan juga bahu jalan di pasar pagi sehingga mengganggu lalu lintas dan juga mengganggu toko-toko yang berada di depannya, selain itu para pedagang ini tidak memiliki modal besar serta tidak adanya akses permodalan hanya rentenir atau keluarga yang bisa memberi pinjaman modal, kemudian tidak adanya infrastuktur untuk berjualan ini lah yang menjadi alasan mereka berjualan di tempat ramai seperti di pasar pagi dan

di kawasan labuhan jukung yang termasuk kawasan yang dilarang untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam negri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya , menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri , dan mewujudkan kota yang bersih ,indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan Penataan dan pembinaan PKL di wilayah masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntuknya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL . Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan

lokasi binaan Bupati/walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah di lengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan hal diatas Bupati/walikota juga diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha , memfasilitasi akses permodalan, memfasilitasi akses bantuan sarana dagang , penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan , pengembangan, jaringan dan promosi, dan pembinaan dan bimbingan teknis, sedangkan pemberdayaan PKL yang membutuhkan fasilitas kerjasama antar Kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur

Pemerintah daerah pesisir barat mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 mengenai Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 6 ayat 1 tertulis bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima bupati berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan pada ayat 3 pembinaan yang dimaksud ayat 1 adalah meliputi bimbingan penjualan , mengupayakan pemberian tempat berjualan yang layak , memberikan teguran apabila PKL melakukan pelanggaran peraturan kemudian pada ayat ke 4 dalam pelaksanaan pendataan dan pembinaan Bupati menunjuk Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan salah satu dinas yang dinaungi oleh tiga Kementrian yaitu Kementrian Koperasi, Kementrian

Perindustrian, dan Kementrian Perdagangan dinas inilah yang bertugas melakukan penertiban dan pembinaan kepada PKL berdasarkan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016.

Diskoperindag khususnya di bidang perdagangan mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kaki lima

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis tertarik meneliti upaya pemerintah kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir barat dalam hal ini melalui DISKOPERINDAG merealisasikan Program daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam membina PKL di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah.yang kemudian akan di tuangkan di dalam karya Ilmiah ini.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah daerah dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang akan di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten Pesisir Barat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian ilmiah yaitu:

### a. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

#### 1). Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam membina pedagang kaki lima yang ada dikecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

#### 2). Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang menggambarkan secara tepat dan benar dan sifat-sifat secara individu , gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu atau menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Kartini kartono,*pengantar metodologi riset sosial*, (mandar maju, Bandung , Cetakan ke VIII,1996), h. 32

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*,(Gramedia pustaka, Jakarta,1998), h. 93

Menurut Jalaludin Rakhmat, Penelitian diskriptif, bukan mencari atau menjelaskan hubungan ,dan juga tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi penelitian ini di tujukan untuk:

- a) Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
- b) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku
- c) Membuat perbandingan yang berlaku
- d) Menentukan apa yang di lakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktuyang akan datang<sup>12</sup>

Penelitian ini menggambarkan secara benar dan tepat tentang upaya pemerintah daerah dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

### 3). Populasi dan Sampel

- (a). Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah subjek yang di teliti, populasi disebut juga Univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel<sup>13</sup>.

Populasi pada penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Jalaludin Rakhmat, *metodologi penelitian komunikasi*, ( Remaja Rosdakarya, Bandung,1996), h 24-25

<sup>13</sup> Wahdi Bachtiar, *metode ilmu dakwah* ,(Logos, Jakarta 1997), h 6

(1). seluruh pegawai dinas yang ada di DISKOPERINDAG Kabupaten Pesisir Barat.

(2). PKL di seluruh kecamatan Pesisir Tengah yang berjumlah 84 orang pedagang yang berjualan di pasar dan di pinggiran pantai daerah wisata labuhan jukung Kruai Pesisir Barat.

b). Sample

Sampel adalah sebagian Individu yang mewakili populasi yang di selidiki<sup>14</sup> ,sampel merupakan sebagian dari jumlah individu yang mewakili populasi dimana karakteristiknya akan di teliti.

Jumlah penelitian yang akan di teliti ini cukup banyak dan dari jumlah ini tidak mungkin dapat di hubungi melalui wawancara secara keseluruhan , maka dalam penelitian ini menggunakan sampel.

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampel, karena penelitian ini bersifat monografis dan melukiskan apa adanya , maksud dari purposive sampling yaitu penelitian sekelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung:2014)h.215



Dikarenakan jumlah populasi penelitian cukup banyak, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini

- (1) Satu orang pegawai di DISKOPERINDAG yaitu bapak Burhanuddin S.H selaku Kasi Perdagangan dalam Negeri Informan inti dalam penelitian ini, sedangkan sample dari PKL 4 orang yaitu terdiri dari,
  - (2). Bapak Rizal pedagang es alpuk
  - (3). Bpk Suwardi pedagang es dungan
  - (4). Bapak Hasan pedagang Ikan laut
  - (5) Bapak Samsul Rahman pedagang bakso

#### 4). Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam menghimpun data dari lokasi ini adalah sebagai berikut:

##### (a) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pengamatan saja melainkan juga pencatatan guna memperoleh data-data yang lebih konkrit dan jelas<sup>15</sup>. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan dan mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan. Jenis observasi yang penulis pilih adalah jenis

---

<sup>15</sup> Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mendiata, 2004), h.44

observasi non partisipan , yaitu peneliti tidak ikut aktif dalam subjek yang di teliti.

(b) Metode interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data yang di peroleh dengan tanya jawab yang di kerjakan secara sistematis dari dua orang berdasarkan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Dalam proses tanya jawab masing-masing pihak dapat mengajukan pertanyaan secara wajar lancar<sup>16</sup>. Adapun interview yang penulis gunakan adalah bebas terpimpin yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan . metode interview digunakan sebagai metode bantu untuk mendapatkan data tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat seperti mengamati , mencatat secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penelitian

(c) Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi adalah nama

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h 3

lain dari dokumen ,buku essay , buku teks , surat kabar, artikel, novel, majalah, politik , iklan, gambar nyata.

Metode dokumentasi ini adalah salah satu jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara<sup>17</sup> . Metode dokumentasi ini di gunakan sebagai metode pelengkap, dalam pelaksanaannya metode dokumentasi ini untuk mengetahui tentang program telah dilakukan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan PKL di wilayah kabupaten pesisir Barat khususnya di kecamatan pesisir tengah.

#### 5). Metode Pengolahan dan Analisis data

Analisa data adalah proses yang membawa bagaimana data diatur , mengorganisasi apa yang ada kedalam sebuah pola , kategori, dan suatu urutan dasar<sup>18</sup>. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan , menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah di pahami adalah menggunakan *thematic analysis* dari Miles dan Huberman.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian kualitatif Teori &Praktik* ( Jakarta: Bumi Aksara,2013),h. 176

<sup>18</sup> Michel Qunn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 250

<sup>19</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif analisis data* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.129

Dalam model ini kegiatan analisis di bagi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan.

(a). Tahap Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman , Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan , dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan .Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelien berlangsung<sup>20</sup> dalam tahap ini peneliti mencoba memilah data yang relevan dengantujuan dan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mencari tahu hal bagaimana upaya pemerintah daerah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten pesisir Barat dalam membina Pedagang kaki lima.

(b)Tahap Penyajian data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan .<sup>21</sup> Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan atau biasanya dalam penelitian kualitatif di kenal dengan istilah inferensi yang merupakan

---

<sup>20</sup> Etta Mamang Sengadji, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta:CV andi offset, 2010)h.199

<sup>21</sup> *Ibid*, h 200

makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab dari suatu permasalahan.

(d) Tahap Verifikasi Data / Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagai kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan di verifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang catatan pada lapangan<sup>22</sup>. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah di kumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah secara konseptual.

Dalam tahapan ini peneliti akan menginterpretasikan data-data yang didapat berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Namun dalam proses ini peneliti akan menggunakan analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu pertama dengan cara membaca hasil dari pada kegiatan pengumpulan data kedua dengan cara melengkapi data yang kiranya masih kurang, ketiga menginterpretasikan data berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> *Ibid*,h. 250

## **BAB II**

### **PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **A. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik biasanya memberi perhatian terhadap masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, akibat tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung juga ikut terlibat<sup>23</sup>

Sejak pasca Perang Dunia II, kata *Policy* mengandung makna kebijakan sebagai sebuah *rationale*, yaitu penilaian penuh pertimbangan. Sehingga bagi Wayne Parsons, kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan<sup>24</sup>

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan akademis, istilah kebijakan ini mungkin digunakan secara luas seperti “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, atau “kebijakan pertanian di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”. Namun, istilah kebijakan dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti, kebijakan pemerintah.

Terdapat banyak definisi mengenai kebijakan publik. Menurut Anderson

---

<sup>23</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal 77

<sup>24</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 15

kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah<sup>25</sup>

Sedangkan dalam pandangan Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Menurut Woll, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. *Pertama*, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*, adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. *Ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat<sup>26</sup>

Keberadaan kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah tindakan pemerintah. Lingkup kebijakan publik begitu luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Apabila dilihat dari hirarkinya, sebuah kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, maupun lokal.<sup>27</sup> Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang- Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>25</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Yogyakarta 2012 hal 21

<sup>4</sup> Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003), hal 2

<sup>27</sup> Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strateg, Strategi dan Kasus*, hal 3.

Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Perbup No. 40 Tahun 2016 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Pesisir barat terkait pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di daerah pesisir barat khususnya yang penulis teliti di kecamatan pesisir tengah.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, sesungguhnya implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran suatu keputusan melainkan merupakan keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Seperti apa yang dikatakan Chief J. O. Udoji bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



maka kebijakan hanya akan berupa impian atau terencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.”<sup>29</sup> Karena itu, setiap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah perlu diimplementasikan sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan.<sup>30</sup> Tahapan implementasi kebijakan berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dan membentuk output yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui program pemerintah<sup>31</sup>

### **1. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan**

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pasti akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pada penelitian ini peneliti merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Menurut George C. Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan<sup>32</sup> yaitu,

#### **a. Komunikasi.**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada

---

<sup>29</sup> Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal 7.

<sup>30</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hal 158

<sup>31</sup> Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, 2003, hal 9

<sup>32</sup> Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal 90.

sasaran dan pihak yang terkait. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana kebijakan tersebut dan sumber daya non manusia, yakni seperti sumberdaya finansial, dan fasilitas. Sumber daya memang merupakan suatu hal yang penting, karena tanpa adanya sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.

c. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan.

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan, apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan pun akan melaksanakan kebijakan dengan baik.

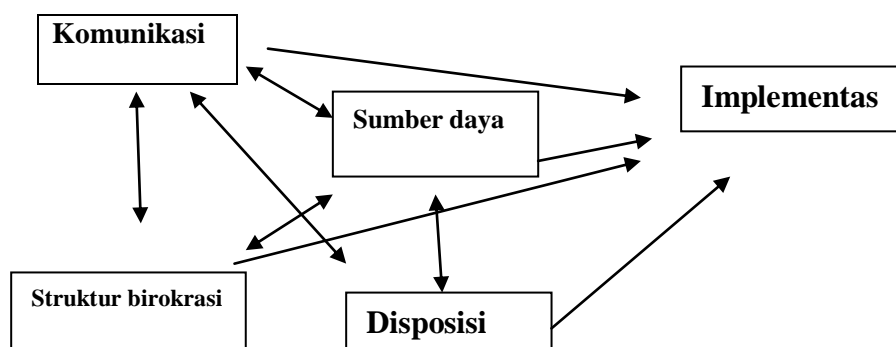
d. Struktur birokrasi

merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang dimaksud di sini tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi- organisasi yang terkait dalam kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup

signifikan terhadap sebuah implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal yaitu, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi, berikut penjelasannya:

- 1) SOP merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan.
- 2) Fragmentasi merupakan struktur birokrasi yang terlalu panjang dan desentralisasi kekuasaan. Dengan adanya hal tersebut akan mengakibatkan lemahnya pengawasan dan menyebabkan struktur birokrasi yang rumit, hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan di luar unit birokrasi seperti kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, dan sebagainya.

(Tabel Teori George C Edwards)



Berdasarkan pemaparan di atas, pada saat setelah dibuatnya sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut perlu untuk diimplementasikan. Sama halnya dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten pesisir Barat terkait Perbup No. 40 Tahun 2016, peneliti menggunakan teori George C. Edward untuk mengetahui apakah Perda tersebut telah berjalan dengan baik atau

belum dalam membina pedagang kaki lima

### **C. Pembinaan pedagang kaki lima**

#### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lebih baik<sup>33</sup>. Sedangkan menurut Masdar Helmi adalah segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara terarah dan teratur.<sup>34</sup>

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang di tujukan kepada orang atau sekelompok orang melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi proses, cara, pembaharuan, dan tindak pembinaan. Selain itu untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

Secara operasional pembinaan yang di maksud skripsi ini adalah kegiatan pemerintah daerah pesisir barat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (Monitoring dan Evaluasi) kepada pedagang kaki lima di kawasan kecamatan pesisir tengah.

---

<sup>33</sup> Ensiklopedia Indonesia vol 2, Jakarta, hal 890

<sup>34</sup> Masdar Helmi *Dakwah Alam dalam Pembangunan I.* (Semarang Toha Putra, 1971), h.132

<sup>35</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Teras 2009), h.144

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan atau sasaran yang hendak di capai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif mungkin.<sup>36</sup> Menurut Louis A. Allen, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berfikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud.

1) Prakiraan (*forecasting*)

Prakiraan adalah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/ memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan atas fakta yang telah diketahui.

2) Penetapan tujuan (*establishing objective*)

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.

3) Pemrograman (*programming*)

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan:

- a) Langkah-langkah yang utama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
- b) Unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
- c) Urutan dan serta pengaturan waktu setiap langkah

---

<sup>36</sup> Nanang fatah, *Landasan manajemen pendidikan* (Bandung , Rosdakarya, 2009), h 49

4) Penjadwalan (*scheduling*)

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

5) Penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu

6) Pengembangan prosedur (*developing procedure*)

Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.

7) Penetapan dan interpretasi kebijakan (*establishing and interpreting*)

Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu organisasi.<sup>37</sup>

Menurut Siagian (1977) dalam buku Mesiono, Manajemen Organisasi proses perencanaan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu:

- 1) Mengetahui sifat-sifat dari ciri-ciri suatu rencana yang baik.
- 2) Mengandung proses perencanaan sebagai rangkaian perencanaan yang harus dijawab dengan memuaskan

---

<sup>37</sup> Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 45-46

- 3) Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan secara ilmiah.<sup>38</sup>

Berdasarkan tiga dimensi proses perencanaan tersebut yang dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

1	Sifat-sifat dan ciri-ciri	Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk
2	Proses perencanaan sebagai suatu sistem	Segala sesuatu harus dijawab dengan memuaskan pihak-pihak tertentu.
3	Proses perencanaan sebagai suatu masalah	Harus dipecahkan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kumpulan orang dengan system kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>39</sup> Dengan kata lain, pengorganisasian adalah pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

#### c. Pengendalian (monitoring)

Monitoring adalah bagian dari pengawasan, dalam pengawasan ada aktifitas memantau (monitoring). Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa apakah program yang telah berjalan itu sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan tujuan dari program. Jadi kegiatan monitoring ini bisa dilaksanakan dengan cara memantau dan mengecek dari aktifitas kegiatan pembinaan

## 2. Pembinaan Sebagai Program dan Proses

<sup>38</sup> Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, (Bandung: Citapustaka, 2012), hal. 19

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 71

Jika di lihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pembinaan upaya pembinaan ini juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program atau pun suatu proses, pembinaan suatu program dimana pembinaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya , konsekuensi dari hal ini , bila program ini selesai dianggap program telah selesai dilakukan . Hal ini banyak terjadi dengan system pembangunan berdasarkan proyek yang banyak di kembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah , dimana yang satu dengan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan , meskipun itu pada lembaga yang sama sedangkan pada beberapa organisasi non pemerintah kegiatannya juga tidak jarang terputus karena telah berakhir dari pihak pendonor.

Pembinaan merupakan upaya untuk memberdayakan seorang maupun kelompok masyarakat tertentu, Hogan menggambarkan proses pemberdayaan berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari tahapan utama sebagai suatu siklus yang terdiri dari tahapan utama, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan nya



Dari siklus diatas akan tergambar mengapa Hogan meyakini proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah berhenti pada satu titik tertentu , tetapi lebih merupakan sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Meskipun Hogan memfokuskan tulisannya pada pemberdayaan yang bersifat *on going process* tersebut bukan berarti tidak dapat diterapkan pada level komunitas.

Keberadaan pandangan yang melihat pembinaan ini sebagai suatu program dan sebagai suatu proses diatas memberikan sumbangan tersendiri terhadap pemahaman tentang pemberdayaan , terutama yang berkaitan dengan diskursus komunitas , peran yang harus dijalankan oleh pelaku perubahan atau pun fasilitator. Sebagai fasilitator, keberadaan agen pengubah tidak mutlak harus hadir terus menerus pada suatu kelompok sasaran . fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar kelompok sasaran menjadi lebih pandai sehingga nantinya dapat mengembangkan kelompok mereka sendiri bila sudah tiba saatnya program telah selesai.

Menurut sedarmayanti ada dua kecenderungan proses pembinaan PKL di suatu kota yaitu kecenderungan Primer dan kecenderungan Sekunder. Kecenderungan Primer , yaitu menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan , kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi usaha yang lebih berdaya, sebagian dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi . sementara kecenderungan sekunder, yaitu menekankan pada proses dialog . sedangkan pendekatannya menggunakan tiga bentuk, yaitu:

- a. Pendekatan sosial budaya, yaitu pendekatan pembinaan yang lebih yang mengedepankan sikap toleransi tinggi.
- b. Pendekatan Ekonomi, yaitu pendekatan pembinaan yang menekankan kepada segala upaya yang berhubungan dengan pengembangan usaha .
- c. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menyangkut perihal kepatuhan terhadap peraturan-peraturan daerah<sup>40</sup>.

### **3. Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Secara umum pembinaan adalah sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang di rencanakan , dalam hal ini pembinaan yang di maksud adalah bagaimana komunitas yang di bina dapat diberdaya karena keberdayaan komunitas masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis dapat mengembangkan diri untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk membina suatu masyarakat agar dapat berdaya secara ekonomis harus di lakukan melalui tiga strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi daya yang dapat di kembangkan
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dalam rangka ini di perlukan langkah-langkah lebih positif dan

---

<sup>40</sup> Sedarmayanti. *Tata kerja dan Produktivitas: Suatu tinjauan dari Aspek ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011 h.75

nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin dalam berdaya memanfaatkan peluang.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dalam proses pemberdayaan yaitu menambah daya kekuatan individu supaya tidak lemah<sup>41</sup>

Pembinaan yang dilakukan agar suatu komunitas masyarakat berdaya seperti diatas mempunyai dua arah yaitu strategi pertama adalah memberi peluang agar sector masyarakat modern dapat tetap maju, oleh karena itu kemajuan di butuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan .Strategi kedua adalah memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup diluar atau dipinggiran jalur hidup modern. Strategi kedua inilah yang perlu lebih di kembangkan yang intinya adalah bagaimana masyarakat menengah kebawah dibantu untuk mandiri dan berdaya , sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya tetapi juga meningkatkan ekonomi nasional.

Dalam melakukan perencanaan harus ada partisipasi aktif dari lapisan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Agar suatu masyarakat khusus disini Pedagang Kaki Lima mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, meningkatkan kualitas

---

<sup>41</sup> Gunawan Sumodiningrat, *memberdayakan masyarakat*, (Jakarta: Penakencana Nusadwipa, 1996) cet. Ke-1 h. 20

hidupnya maka harus ada kesadaran bahwa mereka harus berusaha sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya , selain adanya kesadaran harus ada kemauan berbuat selanjutnya harus ada keyakinan bahwa mereka mampu berbuat,dengan demikian di perlukan pengetahuan praktis, keterampilan, serta ,kemampuan kerja sama kelompok lain.

Menurut Frans Wiryanto jomo , untuk memberikan daya kepada ,masyarakat maka perlu ada strategi-strategi yang harus di tempuh sebagai berikut:

- a. Melakukan Inventarisasi masalah yang dirasakan masyarakat yang akan di berdayakan serta harapan mereka
- b. Mmpelajari aturan-aturan yang ada mengenai pemberdayaan sector tersebut, termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah atau lainnya bila kita memberdayakan atau mengembangkan sector tersebut.
- c. Melakukan persuasi agar anggota komunitas yang sudah diyakinkan bahwa mereka harus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya,mengatasi sendiri masalahnya mengusahakan sendiri harapan-harapannya
- d. Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah diyakini bahwa mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya, agar bukan hanya mereka sadar melainkan juga mau berbuat
- e. Penyusunan (perencanaan) program kerja ini hendaklah kelompok kerja sendiri dengan menerima masukan itu sendiri dengan aparat pemerintah daerah

- f. Penyusunan kelompok-kelompok kerja, suatu kelompok kerja mengenai suatu pemberdayaan
- g. Memberikan pengetahuan praktis mengenai sector yang di kembangkan melalui penyuluhan dan sebagainya
- h. Pemberian keterampilan melalui pelatihan dan sebagainya
- i. Pemberian pengalaman nyata dilapangan dalam pengembangan masyarakat dalam proyek percontohan
- j. Pemberian fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan material,perangsang dan penunjukan konsultasi teknis.
- k. Pemberian pengetahuan praktis evaluasi kerja pemberdayaan (pembangunan) masyarakat diantaranya evaluasi proses,evaluasi pencapaian target,evaluasi pemberdayaan.<sup>42</sup>

#### **D. Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima adalah pedagang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relative kecil. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan lebarnya lima kaki. Tempat ini umumnya terletak ditrotoar, depan toko dan tepi jalan . Ada yang menyatakan bahwa istilah pedagang kaki lima berasal dari orang

---

<sup>42</sup> Frans Wiryanto Jomo,*Membangunan Masyarakat*. (Bandung:Alumni. 1986), h.83-84.

yang berdagang yang menggelar barang dagangannya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki empat, ditambah dengan sepasang kaki pedagangannya sehingga berjumlah lima maka timbulah julukan pedagang kaki lima<sup>43</sup>

## 2. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Manusia berdagang sebagai mata pencaharian. perdagangan pertama kali terjadi, yang pasti sudah ada sejak nenek moyang dahulu, ribuan tahun lalu. Sementara itu, tentang kemunculan pedagang kaki lima (PKL) bisa dirunut hingga ke masa penjajah Belanda di Indonesia. Istilah “kaki lima” pun pertama kali muncul di masa penjajah Belanda.<sup>44</sup>

Jika mengikuti sejarah, mestinya sebutannya adalah “pedagang lima kaki”, sesuai dengan luasnya trotoar yang di buat pemerintah Belanda.

Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Jika berpatokan pada trotoar lima kaki (1,5 meter) yang di buat Belanda, lalu bagaimana dengan pedagang yang menggunakan gerobak atau pikulan. Padahal mereka juga termasuk PKL. Mereka sebenarnya tidak berjualan ditrotoar atau emperan toko, mereka di sebut PKL<sup>45</sup>

Terdapat beberapa asal usul penyebutan istilah PKL. Salah satunya dari trotoar buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki), seperti yang

---

<sup>43</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005, h.140

<sup>44</sup> Permadi Gilang, S.S, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2007) Cet 1, h. 2

<sup>45</sup> *Ibid* h. 3

disebutkan di atas. Itu pun sebenarnya tidak begitu tepat. Menurut seorang tokoh Indonesianis bernama William Liddle, aturan trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, *five foot* (lima kaki). Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan trotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Yang membuat trotoar di Indonesia adalah gubernur jenderal asal Inggris, Sir Stamford Raffles.<sup>46</sup>

Sementara, menurut sumber lain, istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Lalu jika kita membuka kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta dikutip oleh Permadi Gilang, S.S, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan “lantai di beri beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”<sup>47</sup>

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (belanda atau inggris). Namun, pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko. Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia.” Maksudnya karena PKL berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu- lalang disamping kanan dan samping kiri para

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid.*,h. 4.

PKL.<sup>48</sup>

Adapun beberapa pengertian PKL (pedagang kaki lima) menurut para ahli yaitu:

- a. Ray Bromley dikutip oleh Ramli Rusli pada umumnya sering di gambarkan sebagai wiraswasta yang independen dan dengan demikian bagian terbesar dari mereka adalah pekerja yang tidak digaji. Keberhasilannya sangat tergantung pada usahanya dan kemampuan menarik pembeli.<sup>49</sup>
- b. Paul Bairoch dikutip oleh Ramli Rusli berpendapat pedagang kaki lima di gambarkan sebagai perwujudan usaha tersembunyi, atau pun sebagai pekerja sederhana yang bertambah secara luar biasa<sup>50</sup>
- c. Soetjipto Wirosardjono dikutip oleh Ramli Rusli berpendapat pedagang kaki lima berpola kegiatan tidak teratur, baik waktu maupun modal dan pemasukanya. Omset biasanya kecil dan di hitung harian, serta tidak di sentuh peraturan pemerintah.<sup>51</sup>

### **3. Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima**

Kegiatan usaha pedagang kaki lima mempunyai hubungan yang sangat penting dengan pembeli yang bersifat komersil dalam artian bahwa pendekatan

---

<sup>48</sup> *Ibid* h.5

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*,h. 64



pada kegiatan usaha dagang terlepas dari hubungan yang bersifat pribadi atau hubungan tetangga. Tidak tetapnya atau sering berpindahnya tempat, menyebabkan pula bahwa hubungan antara pembeli dengan PKL sering hanya hubungan sepintas lalu atau lebih merupakan hubungan yang tidak disengaja atau terjadinya karena kebetulan saja. Pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual dan untuk itu pedagang akan memilih tempat berjualan yang dipandang sesuai, juga dipilih waktu tertentu yang banyak didatangi para pengunjung<sup>52</sup>

Pedagang kaki lima sebagai kelompok yang melayani kebutuhan masyarakat, pada dasarnya terlibat didalam proses niaga dilihat dari kegiatan pekerjaannya sehari-hari. Proses niaga disini dapat berarti menyalurkan atau menjadi salah satu mata rantai yang menghubungkan produsen kepada konsumen melalui barang atau jasa yang dijualnya kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya. Barang ataupun jasa tersebut biasanya langsung ditujukan kepada konsumen akhir atau pemakai langsung, sehingga dengan demikian PKL merupakan mata rantai terakhir yang berhubungan dengan konsumen<sup>53</sup>

Selain itu terdapat kegiatan menyimpan secara terorganisir yang sering dikenal dengan arisan, sudah lebih banyak dipraktikkan dikalangan pedagang kaki lima. Cara simpanan arisan ini disebut sebagai suatu bentuk budaya sosial yang tradisional serta dapat merangsang dan membina orang menjadi anggota

---

<sup>52</sup> Ramli Rusli “*Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima*” (Jakarta:Ind-Hill.co, 1992), h. 93.

<sup>53</sup> *Ibid.*,h. 101

dalam sistem ekonomi yang lebih modern. Karena arisan pada dasarnya mempunyai maksud untuk menyimpan uang modal usaha dan dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara pesertanya<sup>54</sup>

Dalam kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk kegiatan UKM (usaha kecil menengah), kegiatan UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh 2 departemen, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama orde baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,h. 135-136

globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM di harapkan dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan<sup>55</sup>

#### **4. Letak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima**

Letak lokasi usaha pedagang kaki lima menjadi sangat penting untuk kegiatan berdagang. Bentuk tempat dagangan para pedagang kaki lima beraneka ragam. Tenda merupakan bentuk yang paling banyak dijumpai, mengingat bahwa tenda sebagai tempat dagangan dapat melindungi PKL dari sengatan panas maupun hujan. Bentuk-bentuk tempat dagangan lainnya adalah kotak, meja, gelaran, pikulan, gerobak dorong maupun sepeda.

Bentuk tempat dagangan tersebut pada umumnya disesuaikan dengan jenis barang dagangan masing-masing serta lokasi usahanya. Barang-barang kelontong misalnya, tempat dagangannya dapat saja berupa gelaran, apabila lokasi tempat usahanya misalkan saja ditrotoar, namun apabila lokasinya terletak dipinggir jalan masuk ke pasar, mungkin gerobak dorong lebih sesuai sebagai tempat dagangan bagi pedagang lainnya.

Bentuk tempat dagangan ini dibuat sedemikian rupa agar mudah dan cepat dapat dipindahkan, terutama pada saat terjadinya penertiban atau

---

<sup>55</sup> Dr. Sartika Tiktik Partomo M.S, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 20.

pengusiran PKL oleh petugas-petugas pemerintah kota. Letak lokasi usaha untuk menempatkan dagangannya, pada umumnya adalah ditepi jalan, trotoar, bahkan sering mengambil sebagian dari jalan umum yang sebenarnya bukan di peruntukan sebagai tempat berjualan. Lokasi-lokasi semacam itu dianggap strategis karena merupakan tempat-tempat umum yang ramai dan banyak dilalui orang, sekaligus juga merupakan calon pembeli dari barang dagangannya. Apabila terjadi pengusiran atau penertiban terhadap PKL, maka biasanya PKL akan berpindah untuk sementara waktu ke lokasi lain dan kemudian kembali lagi ke lokasi semula apabila petugas-petugas pemerintahan kota telah pergi<sup>56</sup>

## **5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan usaha perdagangan dalam rangka mencari keuntungan yang dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan yang terbatas dan tempat usaha di pusat-pusat konsumen yang tidak memiliki izin usaha. Kriteria dari pedagang kaki lima, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha , tidak terorganisir secara baik
- b. Tidak memilliki izin usaha
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha , baik ditinjau dari tempat usaha

---

<sup>56</sup> Ramli Rusli “*Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima*” (Jakarta:Ind-Hill.co, 1992), h. 123-124.

maupun jam kerja.

- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai
- e. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Buchari Alma, *kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005, h.140

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Teori dan praktik ekonomi Islam Jakarta : Rineka. 1995
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta, Teras 2009
- Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi*, Jakarta: Mendiutama, 2004
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Buchari Alma, *kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori & Proses Yogyakarta: Media Presindo, 2007
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta 1990
- Dr. Sartika Tiktik Partomo M.S, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Dr. Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ensiklopedia Indonesia vol 2, Jakarta, hal 890
- Ensiklopedia Indonesia vol 1, Jakarta, hal 890
- Etta Mamang Sengadji, *Metode Penelitian* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010
- Frans Wiryanto Jomo, *Membangunan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1986
- Gunawan Sumodiningrat, memberdayakan masyarakat, (Jakarta: Penakencana Nusadwipa, 1996) cet. Ke-1
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, 2003
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003
- Jalaludin Rakhmat, metodologi penelitian komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Kartini kartono, pengantar metodologi riset sosial, mandar maju, Bandung, Cetakan ke VIII, 1996
- Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, Gramedia pustaka, Jakarta, 1998
- Lampiran Perbup No 40 tahun 2016

- mam Gunawan, *Metodelogi Penelitian kualitatif Teori &Praktik* , Jakarta: Bumi Aksara,2013
- Masdar Helmi *Dakwah Alam dalam Pembangunan I*.Semarang Toha Putra, 1971
- Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung: Citapustaka, 2012
- Michel Qunn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006
- Nanang fatah,*Landasan manajemen pendidikan* (Bandung , Rosdakarya,2009),h
- Nanang fatah,*Landasan manajemen pendidikan* Bandung , Rosdakarya 2009
- Permadi Gilang, S.S, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007
- Ramli Rusli “*Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima*” ,Jakarta:Ind-Hill.co, 1992
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung:2014
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahdi Bachtiar, *metode ilmu dakwah* ,Logos, Jakarta 1997
- Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* Jakarta:Kencana, 2006